

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 ini didapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta sasaran dan target strategis Kecamatan Baamang. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikator yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Secara umum tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Baamang 2016-2021 adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Baamang selama lima tahun kedepan yang diselaraskan dengan kondisi organisasi Kecamatan Baamang, isu strategis dan kemampuan keuangan daerah. Perencanaan pembangunan tersebut akan tercermin kedalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan capaian indikator kinerja yang terukur dan terarah sehingga akan dapat dievaluasi hasilnya. Sedangkan dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, dokumen Renstra Kecamatan Baamang 2016-2021 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baamang dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien yang berorientasi pada pelayanan, meningkatkan penguatan pemerintahan desa/kelurahan dan meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan.

Kami menyadari dokumen Renstra Kecamatan Baamang 2016-2021 ini masih banyak kekurangannya namun demikian kami berharap semua kebijakan program dan kegiatan yang kami susun diarahkan pada kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh semua elemen baik aparatur Kecamatan Baamang, masyarakat dan pelaku dunia usaha dapat mengarahkan kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Kabupaten maupun bagi pihak lain yang memerlukan.

Sampit, Nopember 2016

CAMAT BAAMANG

H. M. YUSRANSYAH, S.IP, MM
NIP.19620828 198303 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BAAMANG.....	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumberdaya Kecamatan Baamang.....	25
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Baamang	29
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Baamang	32
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Baamang.....	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	34
3.3. Telaahan Renstra Nasional dan Renstra Provinsi	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	38
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	40
4.1. Visi dan Misi Kecamatan Baamang.....	40
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Baamang	42
4.3. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Baamang.....	44
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	48
5.1. Rencana Program	48
5.2. Rencana Kegiatan	49
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	59
BAB VII PENUTUP	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Baamang Menurut Tingkat Pendidikan.....	26
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kecamatan Baamang Berdasarkan Tingkat Jenjang Pelatihan	26
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kecamatan Baamang Berdasarkan Pangkat dan Golongan	27
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Baamang	28
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur	30
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur	31
Tabel 3.1 Program Aksi Bupati Wakil Bupati berkaitan dengan Program Trisakti Presiden dan Wakil Presiden.....	36
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021 ..	46
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021	47
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021	50
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Baamang yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Baamang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA PERENCANAAN STRATEGIS KECAMATAN BAAMANG

Urusan Pemerintahan Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Adapun tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan meliputi :

- 1) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 3) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- 6) membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- 7) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Camat menyelenggarakan fungsi :

- 1) melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati;
- 2) melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) memberikan pembinaan kepada pemerintah desa/kelurahan;
- 6) melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun di bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Kecamatan;
- 8) memberikan pelayanan administrasi semua perizinan yang dilimpahkan;
- 9) melaksanakan pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat;
- 10) melaksanakan koordinasi di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
- 11) melaksanakan koordinasi dengan unsur muspika, UPTD, atau unit kerja yang ada di wilayah Kecamatan;
- 12) melaksanakan pembinaan kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat di wilayah Kecamatan;
- 13) memfasilitasi semua permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
- 14) melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

Susunan Organisasi Kecamatan Baamang masih mengacu pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana struktur organisasi Kecamatan Baamang terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Pelaporan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Seksi Administrasi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Rencana strategis Kecamatan Baamang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, dalam hal ini Kecamatan Baamang, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Keputusan Camat Baamang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Rencana strategis Kecamatan Baamang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Baamang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baamang yang merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Baamang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Visi dan misi Kecamatan Baamang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

Visi Kabupaten Kotawaringin Timur dirumuskan dengan melihat, menilai dan memberi predikat Kabupaten Kotawaringin Timur yang akan datang, yaitu kondisi ideal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diinginkan pada masa yang akan datang. Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat yang Madani, Dinamis, Mandiri, dan Berdaya Saing dalam Suasana Religius, Kebersamaan, Aman dan Sejahtera”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Kabupaten Kotawaringin Timur, dapat menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Sehingga visi Kecamatan Baamang mengikuti visi Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Baamang.

Adapun Visi Kecamatan Baamang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021, yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Baamang yang dinamis, mandiri, dan sejahtera melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat”***.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.
- b. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
- d. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya

Dari 4 (Empat) Misi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Baamang melaksanakan misi ke-3, yaitu ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien”***.

Kecamatan Baamang melaksanakan misi tersebut, karena sesuai dengan tugas pokok Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah, serta mempunyai fungsi untuk melaksanakan dan memberikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kecamatan.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan strategis Kecamatan Baamang merupakan penjabaran yang akan dicapai sebagai wujud dari misi guna mewujudkan visi yang mengacu pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan able dual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik;

Dengan indikator :

- Indeks kepuasan masyarakat

2. Meningkatkan penguatan pemerintahan desa/kelurahan;

Dengan indikator :

- Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi
- 3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan;
Dengan indikator :
 - Tertanganinya pelanggaran trantibmas
- 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan
Dengan indikator :
 - Nilai AKIP Kecamatan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Baamang dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Baamang dalam periode pembangunan 2016-2021, antara lain :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima;
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
 - b. Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
2. Meningkatnya kulaitas pemerintahan desa/kelurahan;
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Prosentase desa/kelurahan yang telah selesai tata batas;
 - b. Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi;
 - c. Prosentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan;
 - d. Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Prosentase pelanggaran trantibmas yang ditangani;
 - b. Jumlah petugas linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa.
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
Dengan indikator sasaran, antara lain :
 - a. Nilai AKIP Kecamatan;
 - b. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti.

Ada 17 (Tujuh Belas) program yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 7) Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah
- 8) Program Penataan Administrasi Kependudukan
- 9) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 10) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

- 11) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
- 12) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
- 13) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- 14) Program Penunjang Kegiatan PKK
- 15) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 16) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 17) Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Untuk mewujudkan 17 (Tujuh Belas) program yang telah ditetapkan tersebut perlu didukung oleh 43 (Empat Puluh Tiga) kegiatan yang sinergis dan akan direalisasi pada tahun anggaran 2019.

C. ISU STRATEGIS

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Baamang selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baamang, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Baamang, antara lain :

- 1) Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di Kecamatan, kelurahan dan desa dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
- 2) Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa sehingga pelayanan kepada masyarakat terhambat;
- 3) Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, kelurahan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing;
- 4) Tidak berimbang Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dengan semakin banyak pelayanan dengan fasilitas sarana penunjang;

Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif, yaitu:

- 1) Pembinaan aparatur/pegawai yang ada di kantor kecamatan, termasuk juga aparatur di kelurahan dan desa;
- 2) Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- 3) Pembinaan perlindungan masyarakat (linmas) dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketertiban umum;
- 4) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan kecamatan, kelurahan dan desa;
- 5) Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Baamang disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- a. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
- h. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur No. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021.
- n. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi Serta Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- o. Surat Keputusan Bupati Nomor:188.45/139/Huk-Org/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/601/Huk-Org/2017 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dilingkungan pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Baamang Tahun 2019 adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Baamang Tahun 2019 adalah untuk menggambarkan telah dilaksanakannya program kerja dan anggaran Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019, sebagai penjabaran hasil program kerja setiap satuan kerja, sehubungan hal tersebut maka wajib bagi Kecamatan Baamang menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2019 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa ahead . Dengan pola ahead seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja.

Pada bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

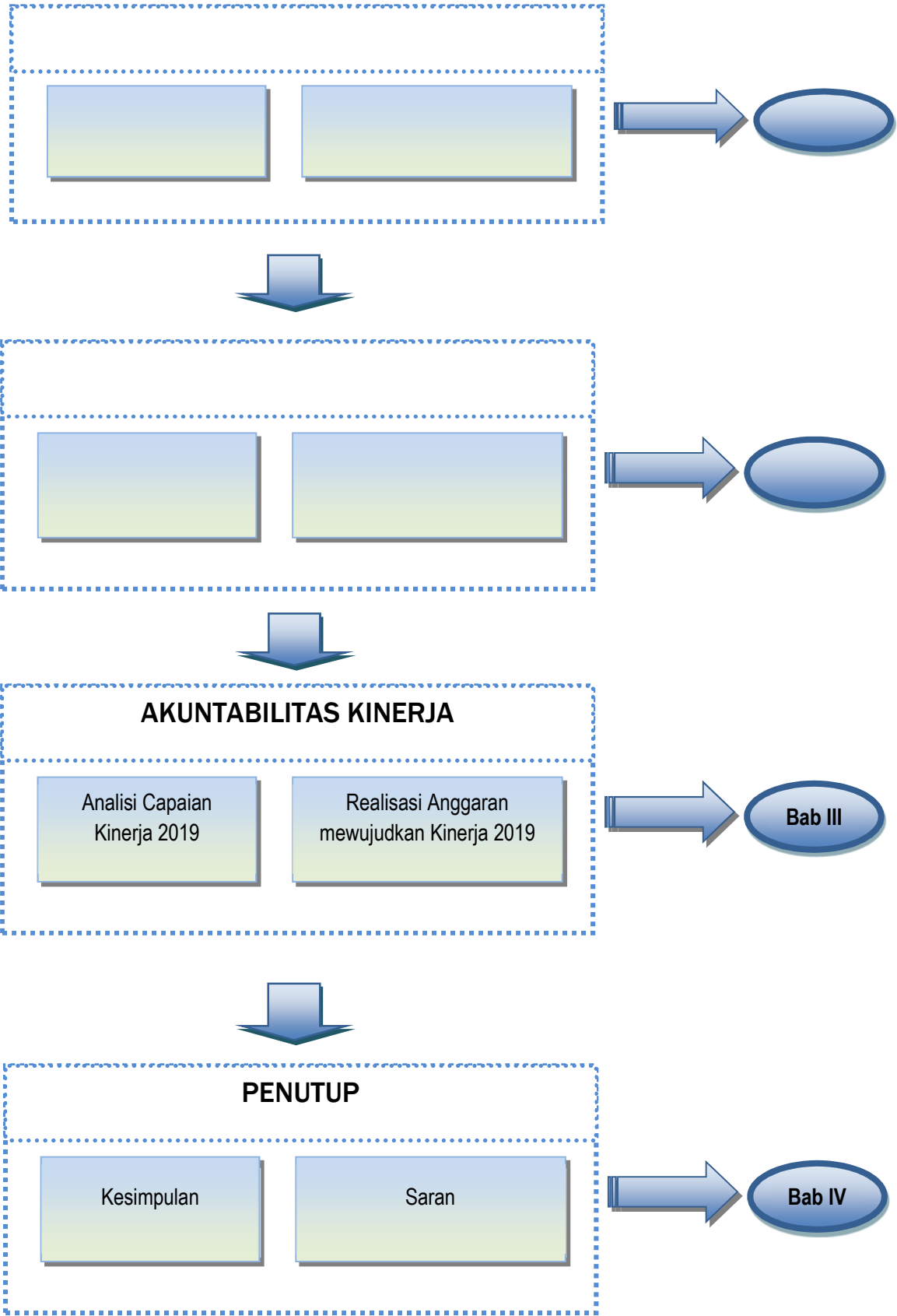
Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran
Atau dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1.
Sistematika Penyajian LKIP Tahun 2019

Referensi Bab



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Baamang Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan peralihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2010-2015 ke RPJMD Tahun 2016-2021 baru ditanda tangani pada bulan Nopember 2017, sedangkan perubahan Nomenklatur SOPD/PD baru ditanda tangani pada Desember 2016 (Perda Kab. Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur). Disamping itu adanya saran dari evaluator LKIP Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021 dan Renstra SOPD agar direvisi/ disesuaikan kembali, sebagai dampak penyesuaian tersebut maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan juga.

Setelah dibahas berkali-kali dan dikonsultasikan berkali-kali dengan fasilitator Kemenpan dan RB mulai Januari 2017 sampai dengan September 2017, baru dibulan Oktober 2017 IKU Kabupaten Kotawaringin Timur dan IKU Perangkat Daerah ditetapkan dan ditanda tangani Bupati Kotawaringin Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Perjanjian Kinerja (PK) SOPD di Kabupaten Kotawaringin Timur baru ditetapkan dan ditanda tangani pada tanggal 6 Oktober 2017.

Untuk Perjanjian Kinerja SOPD kecamatan Baamang pada tahun 2019 idealnya dilaksanakan Perjanjian Kinerja dilaksanakan awal tahun yang sudah ditanda Tangani Oleh Bupati kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 2 Januari 2019.

Dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja (PK) SOPD Kecamatan Baamang tanggal 2 Januari 2019, maka mengefektifkan kinerja di Kecamatan Baamang, seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Baamang untuk Camat/Kepala SOPD, dan pejabat eselon III (sekcab) serta Pejabat eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Lurah) juga ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2019.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baamang, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Baamang Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Baamang Tahun 2019 sebagai berikut :

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Baamang sebagaimana table 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Baamang Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	2	3
1	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 Tahun 2014 dan SK Menpan No.25 Tahun 2014)
2	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	Jumlah usulan hasil musrenbang kelurahan/desa yang tertampung pada Musrenbang RKPD di Kecamatan Baamang dibandingkan Jumlah usulan hasil musrenbang kelurahan/desa yang disampaikan ke Kecamatan Baamang dikalikan 100%
3	Prosentase desa/kelurahan telah selesai Tata Batas	Jumlah Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas Desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Baamang dikalikan 100%
4	Prosentase desa/kelurahan yang tertib administrasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi dibandingkan Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Baamang dikalikan 100%
5	Prosentase lembaga perekonomian milik desa/kelurahan	Jumlah BUMDes yang ada Kecamatan dibandingkan Jumlah Desa yang ada di Kecamatan Baamang dikalikan 100%
6	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Data jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif
7	Prosentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani	Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang ditangani dibandingkan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban yang terjadi di Masyarakat dikalikan 100%
8	Jumlah petugas linmas di Kecamatan/ Kelurahan/Desa	Jumlah petugas Linmas kecamatan/Kelurahan/desa yang dilatih/dibina
9	Nilai AKIP Kecamatan	Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) kecamatan oleh Inspektorat
10	Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti	Temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti dibandingkan Jumlah temuan BPK/Inspektorat di Kecamatan Baamang dikalikan 100%

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat berbagai indikator kinerja yang berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan, menentukan,memberikan suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu. Selain itu, indikator mengandung ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian asas suatu sasaran. Indikator kinerja adalah petunjuk untuk memahami kinerja yang telah dicapai,seperti seberapa baik suatu organisasi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) memenuhi maksud (*purpose*), kemajuan yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi atau SOPD. Indikator kinerja adalah ukuran keuangan dan non keuangan dari berbagai aspek yang berbeda dari suatu organisasi atau SOPD. Indikator kinerja merupakan ukuran atas perilaku yang kritis bagi organisasi atau SOPD namun tidak dapat memecahkan masalah.Secara kongkrit indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur di lampiran 2, atau secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :**Tabel 2.2**

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Baamang
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik
		2. Persentase usulan yang tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/ Kelurahan	3. Persentase Desa/Kelurahan dengan selesainya Tata batas Desa/Kelurahan	%	100
		4. Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	%	100
		5. Prosentase Lembaga perekonomian milik Desa	%	100
		6. Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Kelompok	6
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan	7. Prosentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	100
		8. Jumlah petugas Linmas Kecamatan/ Kelurahan/Desa	Orang	45
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	9. Nilai AKIP	Nilai	62,00
		10. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	%	100

C. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, hendaknya memperhatikan Kontrak kinerja, dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan tahunan, dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan kinerja, dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap instansi atau Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) untuk :

- 1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi ;
- 2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah ;
- 3. Menilai keberhasilan organisasi.

Pada setiap akhir tahun periode, instansi atau SOPD melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja biasanya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil pengukuran kinerja dilaporkan oleh instansi atau SKPD dalam Laporan Kinerja atau biasa disebut LKIP.

LKIP instansi atau SOPD ini disampaikan kepada Sekretaris Daerah kabupaten Kotawaringin Timur up.Kabag Organisasi Tata Laksana Skretaris Daerah, dan LKIP dapat dimanfaatkan untuk :

- 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2019 adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Baamang 2018 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baamang 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baamang 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2019.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Baamang meliputi 4 (empat) sasaran strategis, sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
- 2. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/Kelurahan
- 3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan
- 4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Perjanjian Kinerja Kecamatan Baamang Tahun 2019, secara garis besar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Kecamatan Baamang
Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Program	Anggaran
1	2	3	5	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Penataan Administrasi Kependudukan 6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 846.257.144,00 Rp. 2.449.977.643,00 Rp. 33.500.000,- Rp. 150.000.000,- Rp. 117.938.920,00 Rp. 4.268.702.618,00 Rp. 17.500.000,-
		2. Persentase usulan yang tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	100%	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 16.088.700,00
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/ Kelurahan	3. Persentase Desa/Kelurahan yang telah selesai Sarana Prasarana Gedung Kantor	70%	1. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp 4.268.702.618,00
		4. Persentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi	100%	1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Rp. 11.600.000,00 Rp. 11.280.000,00
		5. Prosentase Lembaga perekonomian milik Desa	100%	1. Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Rp. 18.750.000,00
		6. Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	6	1. Program Penunjang Kegiatan PKK	Rp. 38.000.000,00
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan	7. Prosentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani	100%	1. Program Pengendalian Kebakaran Hutan 2. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanian 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rp. 17.242.500,00 Rp. 5.500.000,00 Rp. 31.608.000,00
		8. Jumlah petugas Linmas dan pakaian seragam komplit untuk TPSPemilu Kecamatan/ Kelurahan/Desa	45 Orang	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 141.574.000,00
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	9. Nilai AKIP	62,00	1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 22.900.000,00
		10. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%		

Jumlah anggaran yang dikelola Kecamatan Baamang Pada Tahun 2019 sebesar Rp. 13.154.274.625,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 4.755.305.100,00 dan Belanja Langsung Rp. 8.398.969.525,00 Sedangkan belanja yang berkaitan dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 Rp.

8.398.969.525,00,-

Perjanjian Kinerja Kecamatan Baamang Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baamang, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2019 secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1, 2, 3 dan 4.

Lampiran 2
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BAAMANG KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN 2016-2021

- 1 Nama /Unit Organisasi : KECAMATAN BAAMANG
2. Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah
3. Fungsi : a. Melaksanakan semua pelimpahan kewenangan yang diserahkan oleh Bupati Kotawaringin timur
b. Melaksanakan koordinasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
c. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
d. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan dan Perundang Undangan yang berlaku
e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan ,memberikan pembinaan kepada pemerintahan Desa/kelurahan
f. Melaksanakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
g. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara umum maupun dibidang pendidikan dan kesehatan diwilayah kecamatan
h. Memberikan pelayanan administrasi semua perijinan yang dilimpahkan
i. Melaksanakan Pelayanan administrasi berupa rekomendasi kepada warga masyarakat
j. Melaksanakan koordinasi dibidang pembangunan , pemerintah dan kemasyarakatan diwilayah kecamatan
k. Melaksanakan koordinasi dengan unsur Muspika,UPTD, atau unit kerja yang ada diwilayah kecamatan
l. Melaksanakan Pembinaan kepada aparatur pemerintah dan warga masyarakat di wilayah kecamatan
m. Memfasilitasi semua permasalahan yang ada diwilayah kecamatan
n. Melaksanakan Penyelenggaraan urusan pemerintah , pembangunan,kemasyarakatan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan

4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	P E N J E L A S A N	
				FORMULASI/RUMUSAN PERHITUNGAN	SUMBER DATA
					SKPD PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Hasil survei kepuasan masyarakat (Permenpan 16 Tahun 2014 dan SK Menpan No. 25 Tahun 2014)	Sekretariat kecamatan Kasi Administrasi Hasil Survei
		Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil	%	Jumlah usulan hasil musrenbang kelurahan/desa yang tertampung pada musrenbang RKPD dikecamatan	Kasi Pembangunan Hasil Musrenbang kelurahan dan

		Musrenbang RKPD di Kecamatan		----- X 100 Jumlah usulan hasil musrenbang kelurahan/desa yang disampaikan ke kecamatan	Musrenbang RKPD dikecamatan
2	Meningkatnya Kualitas Pemerintah Desa/ kelurahan	Prosentase Desa/kelurahan yang telah selesai tata Batas	%	Jumlah Desa/kelurahan yang selesai tata batas dikecamatan ----- X 100 Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di kecamatan	kasi Tata Pemerintahan Berita Acara kesepakatan batas kelurahan/desa di kecamatan
		Prosentase Desa/kelurahan yang tertib administrasi	%	Jumlah desa/kelurahan yang di evaluasi ----- X 100 Jumlah desa/kelurahan yang ada di kecamatan	kasi PMD Hasil penilaian evaluasi desa/ kelurahan di kecamatan
		Jumlah PKK Desa/kelurahan Aktif	Jumlah	Jumlah PKK Desa/kelurahan yang aktif	Sekretariat kecamatan
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP kecamatan	Nilai	Laporan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kecamatan oleh Inspektorat	Sekretariat kecamatan
		Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti	%	Temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindak lanjuti ----- x 100 Jumlah Temuan BPK/Inspektorat	Sekretariat kecamatan

Sampit, Desember 2019
Pit. CAMAT BAAMANG,

RODY KAMISLAM,S.Hut,M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19740804 199903 1 005

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
		2. Prosentase pelayanan PATEN yang selesai tepat waktu	100%
		3. Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di kecamatan	100%
2	Meningkatnya kualitas Pemerintahan Desa/kelurahan	1. Prosentase Desa/kelurahan yang telah selesai tata batas	100%
		2. Prosentase Desa/kelurahan yang tertib administrasi	100%
		3. Jumlah PKK Desa/kelurahan aktif	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan	1. Nilai AKIP kecamatan	62,00
		2. Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	100%

Sampit, Januari 2020
 Plt. CAMAT BAAMANG,

RODY KAMISLAM,S.Hut,M.Si
 PEMBINA TK.I
 NIP. 19740804 199903 1 005

Lampiran 4
PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BAAMANG
TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET KINERJA	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
						TARGET %		ANGGARAN (Rp)	%
	2	3	4	5	6	7		9	10
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1.Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Baik	2.633.497.643,-	Baik	100	2.592.472.545,-	96,33
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
			3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
			4. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur						
		2.Prosentase Pelayanan PATEN yang selesai tepat waktu	1.Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	100%	4.386.641.538,-	100%	100	3.427.262.471,-	87,95
			2.Program Penataan Daerah Otonomi Baru						
		3.Prosentase Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di kecamatan	1.Program perencanaan pembangunan Daerah	100%	16.088.700	100%	100	12.363.306,-	76,84

2	Meningkatnya kualitas Pemerintah Desa/ Kelurahan	1.Prosentase Desa/kelurahan yang telah selesai Tata Batas	1.Program Penataan Daerah Otonomi Baru	83%	4.268.702.618,-	100%	100	3.311.307.267,-	77,57
		2.Prosentase Desa/kelurahan yang tertib administrasi	1.Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 2.Program pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa	100%	22.880.000,-	100%	100	19.995.000,-	87,31
		3.Jumlah PKK Desa/kelurahan aktif	1.Program Peningkatan Peran Perempuan dipedesaan	6 PKK	38.000.000,-	6 PKK	100	20.436.000,-	53,78
		1.Nilai AKIP kecamatan	1.Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	61,97	22.900.000,-	62,69	107,44	16.322.680,-	71,28
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja kecamatan	2.Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti		100%	-	100%	100	-	-
CAPAIAN KINERJA / REALISASI ANGGARAN								6.315.159.269	78,72

Sampit, Desember 2019
Plt. CAMAT BAAMANG.

RODY KAMISLAM,S.Hut,M.Si
PEMBINA TK.I
19740804 199903 1 005

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Baamang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Sebagai pengukuran kinerja Kecamatan Baamang agar diketahui tingkat keberhasilan atau tidak, maka ditentukan kategori pencapaian kinerja berdasarkan rata-rata atas indikator kinerja menjadi 4 (empat) kategori, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
1	>100 %	Baik Sekali (BS)
2	91 % - 100 %	Baik (B)
3	81 % - 90 %	Cukup (C)
4	< 81 %	Kurang (K)

Secara umum Kecamatan Baamang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021 serta sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Dalam Renstra dan Penetapan Kinerja Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat 1 Misi Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilaksanakan Kecamatan Baamang, yang memiliki 4 (Empat) sasaran dan 10 (Sepuluh) indikator sasaran yang harus dilaksanakan.

Adapun pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Baamang pada Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori Capaian Sasaran Startegis	Capaian
1	2	3
1	Baik Sekali	20%
2	Baik	70%
3	Cukup	10%

4	Kurang	-
---	--------	---

Dari 4 sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Target Sasaran Tahun 2019

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian							
			Baik Sekali		Baik		Cukup		Kurang	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	2	-	-	2	100	-	-	-	-
2	Sasaran 2	4	1	25	3	75	-	-	-	-
3	Sasaran 3	2	-	-	1	50	1	50	-	-
4	Sasaran 4	2	1	50	1	50	-	-	-	-
Jumlah		10	2	20	7	70	1	10	-	-

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (empat) sasaran yang mencakup 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 2 (dua) indikator sasaran atau 20% Baik Sekali, 7 (tujuh) indikator sasaran atau 70% Baik, 1 (satu) indikator sasaran atau 10% Cukup. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai **101,68%** atau bermakna **Baik Sekali**. Jadi dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian Kinerja Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah **“Baik Sekali”** dengan nilai **101,68 %**.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BAAMANG TAHUN 2019

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai didapat dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Hasil pengukuran dan pencapaian Kinerja sasaran Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 dapat di lihat pada **lampiran 5**.

Adapun pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 4 (empat) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016-2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagai berikut :

1

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” diukur melalui 2 (dua) indikator.

Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran 1
“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” Tahun 2019
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100	Baik	100
2	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100		100

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” adalah sebesar **100 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian “**Baik**” atau “**Mencapai Target**”.

Perbandingan **realisasi kinerja** tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 1
2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Belum dilakukan penilaian	Baik

2	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan	Persentase	100	100
---	--	------------	-----	-----

1. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 80,89 penilaian tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004, dimana persepsi penilaian IKM, yaitu :

A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00

B (Baik) : 62,51 - 81,25

C (Kurang Baik) : 43,76 - 62,50

D (Tidak Baik) : 25,00 - 43,75

Oleh karena itu, berdasarkan target yang harus dicapai Kecamatan Baamang yaitu nilai Baik, yang berarti nilai hasil survey IKM Kecamatan Baamang harus bernilai diantara **62,51 s/d 81,25**, sesuai dengan hasil survey IKM yang dilakukan dimana hasil survey mendapatkan **nilai 80,89**, maka dapat disimpulkan mendapat nilai **Baik**, sehingga persentase capaian kinerja adalah **100%** atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan Tahun 2018 belum dilakukan penilaian sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Tahun 2019 adalah tahun keempat Renstra, capaian tahun 2019 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 yaitu bernilai **“Baik”**, maka capaian kinerja mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Sekretariat Kecamatan dan Seksi Administrasi, hasil perhitungan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan Kecamatan Baamang, dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Baamang Tahun 2019

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan
1	2	3	4	5

1	Prosedur pelayanan	150	481	3,21
2	Persyaratan pelayanan	150	469	3,13
3	Kejelasan petugas pelayanan	150	486	3,24
4	Kedisiplinan petugas pelayanan	150	491	3,27
5	Tanggung jawab petugas pelayanan	150	489	3,26
6	Kemampuan petugas pelayanan	150	498	3,32
7	Kecepatan pelayanan	150	484	3,23
No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Responden	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	Nilai Indeks Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
8	Keadilan mendapatkan pelayanan	150	487	3,25
9	Kesopanan dan keramahan petugas	150	498	3,32
10	Kewajaran biaya pelayanan	150	474	3,16
11	Kepastian biaya pelayanan	150	487	3,25
12	Kepastian jadwal pelayanan	150	497	3,31
13	Kenyamanan lingkungan	150	501	3,34
14	Keamanan pelayanan	150	494	3,29
IKM Unit Pelayanan				80,89
Mutu Pelayanan				B
Kinerja Unit Pelayanan				Baik

Nilai unsur pelayanan atau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Baamang terhadap 150 responden dengan perhitungan sebagai berikut :

- Nilai Indeks Unit Pelayanan = Nilai Unsur Pelayanan (NRR) x penimbang (0,071)
- Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks Unit Pelayanan x Nilai Dasar (25)

Maka diperoleh hasil :

Nilai IKM setelah dikonversi = 3,24 x 25 = 80,89

Hasil survey pada Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan 14 indikator pada Kemenpan No.25/M/PAN/2/2014 menunjukkan dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil hasil IKM Tahun 2018 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan yaitu :

- Kenyamanan Lingkungan dengan nilai 3,34 dan
- Kesopanan dan keramahan petugas dengan nilai 3,32.

Adanya unsur pelayanan tertinggi pada survey IKM, disebabkan ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung, antara lain :

- a. Kondisi kantor yang aman dan nyaman, yang dibuktikan dengan terpilihnya Kantor Kecamatan Baamang sebagai Juara 2 Lomba Kebersihan Tingkat SOPD se-Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018
- b. Adanya keinginan dari seluruh pegawai Kecamatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
- c. Selalu diadakan evaluasi secara berkala tentang pelayanan PATEN di Kecamatan Baamang

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah dalam hasil survey IKM, yaitu :

- a. Persyaratan pelayanan dengan nilai 3,13 dan
- b. Kewajaran biaya pelayanan dengan nilai 3,16

Hal tersebut karena adanya beberapa hal yang mengakibatkan rendahnya penilaian tersebut, antara lain :

- a. Ketidaktahuan masyarakat bahwa pelayanan PATEN di Kecamatan saat ini tidak dikenakan tarif/biaya
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi apabila mengajukan permohonan pelayanan surat/dokumen di Kecamatan

Adapun solusi untuk meningkatkan kedua nilai yang rendah tersebut, antara lain :

- a. Pada setiap pertemuan dengan warga masyarakat pihak Kecamatan akan memberikan penjelasan tentang syarat yang harus disiapkan untuk memohon pembuatan surat izin atau rekomendasi di Kecamatan, serta pelayanan di Kecamatan Baamang tidak dipungut biaya
- b. Menyampaikan kepada petugas pelayanan agar tidak memungut biaya dikarenakan pelayanan tanpa adanya pungutan biaya

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi/rencana aksi pada tahun berikut adalah :

- a. Melakukan pembinaan kepada seluruh aparatur/ pegawai Kecamatan dan Kelurahan di Kecamatan Baamang tentang memberikan pelayanan publik yang baik.
- b. Perlu melakukan studi pembelajaran ke Instansi lain/ke daerah lain atau memberangkatkan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan publik.

Program pendukung capaian indikator kinerja Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya belanja jasa komunikasi, sumberdaya air, kebutuhan listrik dan internet, jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, makanan dan minuman kegiatan/rapat, dan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah, yang tujuannya untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.846.257.144,- dan realisasi sebesar Rp.794.546.882,- atau penyerapan anggaran sebesar 93,89%

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya gedung kantor dan peralatan/perlengkapan kantor yang memadai, terpeliharanya gedung kantor, terpeliharanya peralatan/perlengkapan kantor dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional, yang tujuannya menunjang kelancaran pelayanan terhadap masyarakat.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.449.977.643,- dan realisasi sebesar Rp.2.415.287.545,- atau penyerapan anggaran sebesar 98,58%

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya pakaian dinas lengkap beserta atributnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur/pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.33.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.31.185.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 93,09%

d. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas/pengetahuan pegawai kecamatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.146.000.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 97,33 %

e. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan perekaman e-KTP di Kecamatan Baamang, dengan tujuan agar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dimana perekaman e-KTP dapat dilakukan di Kecamatan tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.117.938.920,- dan realisasi sebesar Rp.115.955.204,- atau penyerapan anggaran sebesar 98,32 %

f. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah tersedianya belanja barang dan jasa untuk kelurahan di Kecamatan Baamang (seperti belanja jasa komunikasi, air, listrik dan internet, kebersihan kantor, pemeliharaan gedung/peralatan, makan dan minum rapat/kegiatan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah), yang tujuannya untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat terutama di Kantor Kelurahan.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.268.702.618,- dan realisasi sebesar Rp.3.311.307.267,- atau penyerapan anggaran sebesar 77,57 %

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tahun 2018

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan administrasi kantor yang tersedia selama setahun sesuai dengan kebutuhan	Persentase	75	93	118%	846.257.114,-	794.546.882,-	93,89%

	Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dilayani dalam setahun	Lembar	900	1.750	194%	7.500.000,-	7.500.000,-	100%
	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bidang/bagian/ seksi yang dilayani dalam setahun	Bidang	8	8	88 %	69.939.864,-	59.783.611,-	85,48%
	Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Unit	13	8	60 %	3.610.000,-	1.260.300,-	34,91%
	Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah administrasi keuangan yang selesai tepat waktu	Laporan	14	14	96%	254.928.380,-	248.652.806,-	97,54%
	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas kantor yang dilayani jasa kebersihan	M2	371,50	468	126%	13.316.000,-	13.316.000,-	100%
	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bidang/bagian/seksi yang terpenuhi alat tulis kantor	Seksi	8	8	100%	40.488.400,-	40.488.400,-	100%
	Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	Lembar	35.000	3600	110 %	14.915.700,-	13.928.033,-	93,38%
	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Item	4	4	100%	7.478.800,-	7.478.800,-	100%
No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Exemplar	360	360	100 %	5.760.000,-	5.760.000,-	100 %
	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah PNS/jumlah peserta rapat/kegiatan yang dilayani makanan dan minuman	Kegiatan	18	18	100%	74.250.000,-	46.302.000,-	62,36%
	Kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kali	20	19	90%	290.390.000,-	286.501.932,-	98,66%
	Kegiatan Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi ke dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	Kali	98	140	146%	63.680.000,-	63.575.000,-	99,84 %

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan (%) aparaturnya yang dilayani sarana dan prasarana yang memadai	Persentase	75	75	100%	2.449.977.643,-	2.415.287.545,-	98,58%
	Kegiatan Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	5	11	210%	1.554.950.000,-	1.545.613.000,-	99,40%
	Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	15	15	100%	88.805.730,-	87.889.000,-	98,97 %
	Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	Unit	8	16	200%	181.961.427,-	178.890.000,-	98,31%
	Kegiatan Pengadaan meubelair	Jumlah meubelair kantor yang dibeli	Unit	12		%	51.595.700,-	50.240.000,-	97,37
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Unit	1					
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	2	100%	16.250.000,-	12.883.500,-	79,28%
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	13	12	92%	64.469.390,-	58.420.795,-	90,62%
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	7	7	100%	9.380.000,-	2.300.000,-	24,52%
	Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Unit	13	13	100%	10.650.000,-	10.645.000,-	99,95%
	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Unit	2	2	100%	471.915.396,-	468.406.250,-	99,26%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin aparaturnya	Kasus	2	1	50%	33.500.000,-	31.185.000,-	93,09%
	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Orang	70	67	96%	33.500.000,-	31.185.000,-	99,09%
No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah sumber daya aparaturnya yang meningkat kapasitas/ pengetahuannya	Persentase	75	75	100%	150.000.000,-	146.000.000,-	97,33%
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparaturnya yang mendapat Diklat/ Bimtek	Orang	24	23	96%	150.000.000,-	146.000.000,-	97,33%

5	Program Penataan Administrasi dan Kependudukan	Prosentase jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman e-KTP	Persentase	80	95	119%	117.938.920,-	115.955.204,-	98,32%
	Kegiatan Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK	Jumlah personil yang melakukan perekaman e-KTP	Orang	4	4	100%	117.938.920,-	115.955.204,-	98,32%
6	Program Penataan Otonomi Baru`	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	Persentase	75	75	100%	4.268.702.618,-	3.311.307.267,-	77,57%
	Kegiatan penyediaan barang dan jasa Kelurahan Baamang Hilir	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	Belanja	21	16	76%	300.536.330,-	271.834.542,-	90,45%
	Kegiatan penyediaan barang dan jasa Kelurahan Baamang Tengah	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	Belanja	21	16	76%	442.790.330,-	412.854.981,-	93,24%
	Kegiatan penyediaan barang dan jasa Kelurahan Baamang Hulu	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	Belanja	21	16	76%	320.398.568,-	249.616.527,-	77,91%
	Kegiatan penyediaan barang dan jasa Kelurahan Baamang Barat	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	Belanja	21	16	76%	318.381.060,-	269.689.131,-	84,71%
	Kegiatan penyediaan barang dan jasa Kelurahan Tanah Mas	Jumlah barang dan jasa kelurahan yang disediakan	Belanja	21	16	76%	210.131.330,-	192.246.514,-	91,49%

2. Pencapaian Usulan yang Tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan

Capaian kinerja indikator usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Baamang adalah sebesar **100%** dari target sebesar **100%** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya adalah **100%** atau mencapai target yang diperjanjikan.

Sedangkan Tahun 2019 menurut data hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Baamang, semua usulan juga telah tertampung dalam Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2020 atau mencapai 100%.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat Renstra, capaian tahun 2020 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Tahun 2021 yaitu 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Baamang yang diperoleh dari Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Baamang, yang berasal dari hasil pengolahan data Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan. Adapun data hasil pengeolahan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang RKPD di Kecamatan Baamang dapat dilihat pada table 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Data Usulan Musrenbang Kelurahan/Desa
yang tertampung pada Musrenbang RKPD di Kecamatan

No.	Kelurahan/ Desa	Jumlah Usulan pada Musrenbang Kelurahan/Desa	Usulan Pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Baamang		
			Usulan Yang Tertampung/ Prioritas	Usulan Yang Tidak Disepakati	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Baamang Hilir	92	79	13	92
2	Baamang Tengah	51	20	31	51
3	Baamang Hulu	104	86	18	104
4	Baamang Barat	75	55	20	75
5	Tanah Mas	37	28	9	37
6	Tinduk	28	20	8	28
Jumlah		387	288	99	387

Usulan yang disampaikan oleh Kelurahan/Desa merupakan usulan yang menjadi prioritas Kelurahan/Desa tersebut untuk perencanaan Tahun 2020 yang merupakan hasil dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbnag) Kelurahan/Desa pada Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kelurahan/Desa. Semua usulan tersebut semuanya di rekapitulasi di Kecamatan Baamang, sebagai usulan Kecamatan Baamang dalam Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan} &= \frac{\text{Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan yang tertampung}}{\text{Jumlah usulan hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan yang disampaikan ke Kecamatan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{387}{387} \times 100 \% = \underline{100 \%}
 \end{aligned}$$

Dimana dalam Musrenbang RKPD semua usulan tersebut dimasukkan ke dalam Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD yang dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

- Usulan yang menjadi prioritas atau pasti tertampung di Anggaran SOPD terkait Tahun 2020
- Usulan yang tidak tertampung akan tetapi masih dapat diusulkan pada APBD Perubahan, APBD Provinsi atau APBN.

Keberhasilan pada indikator usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Baamang, disebabkan oleh :

- Pada setiap kegiatan Musrenbang Kelurahan/Desa selalu disampaikan agar mengusulkan usulan pembangunan harus berdasarkan data dukung yang lengkap, sehingga usulan yang dibuat akan mudah diterima oleh SOPD terkait.
- Usulan Musrenbang Kelurahan/Desa sudah merupakan hasil kesepakatan bersama antar semua unsur yang ada di Kelurahan dan telah disepakati hal-hal yang menjadi prioritas yang perlu diperjuangkan bersama.

Program pendukung capaian indikator usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan Baamang, adalah Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, dengan pagu anggaran sebesar Rp.16.088.700,- , dan dengan realisasi sebesar Rp.12.363.306,- atau penyerapan anggaran sebesar 76,84%

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Program/ Kegiatan Penunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Usulan yang Tertampung Dalam Hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan
Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase usulan yang tertampung dalam hasil musrenbang RKPD di Kecamatan	Persentase	100	100	100%	16.088.700,-	12.363.306,-	76,84%
	Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah masyarakat/ organisasi yang hadir dalam kegiatan musrenbang RKPD di Kecamatan	Orang	250	275	100,12%	16.088.700,-	12.363.306,-	76,84%

2

Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan”** diukur melalui 4 (empat) indikator.

Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Sasaran 2
“Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan” Tahun 2019
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	%	83	100	120,48	100	100
2	Prosentase Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	%	100	100	100,00	100	100

3	Prosentase lembaga perekonomian milik Desa	%	100	100	100,00	100	100
4	Jumlah PKK Desa/ Kelurahan aktif	Kelompok	6	6	100,00	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					105,12		100

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan diukur melalui 4 (empat) indikator yang diperjanjikan yaitu Prosentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas, Prosentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi, Prosentase Lembaga perekonomian milik Desa, dan Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran ***“Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/Kelurahan”*** adalah sebesar **105,12 %** yang berarti masuk dalam katagori capaian ***“Baik Sekali”*** atau ***“Melebihi Target”***.

Perbandingan **realisasi kinerja** tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan sebagaimana tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 2
2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Prosentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas	Persentase	83	100
2	Prosentase Desa/Kelurahan yang tertib Administrasi	Persentase	100	100
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
3	Prosentase lembaga perekonomian milik Desa/Kelurahan	Prosentase	100	100
4	Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif	Jumlah	6	6

1. Pencapaian Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas

Capaian kinerja indikator persentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas adalah sebesar **100%** dari target sebesar **83%** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100 %** sesuai dengan target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun keempat Renstra, capaian tahun 2019 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 yaitu 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Desa/kelurahan yang telah selesai tata batas yang diperoleh dari Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Baamang. Penyelesaian batas Kelurahan/Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tersebut, maka dapat diketahui pencapaian penetapan dan penegasan batas desa di Kecamatan Baamang melalui tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Pencapaian Tahapan Penetapan Batas Desa/ Kelurahan di Kecamatan Baamang
Sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016

No.	Tahapan	Kelurahan/Desa					
		Baamang Hilir	Baamang Tengah	Baamang Hulu	Baamang Barat	Tanah Mas	Tinduk
1	2	3	4	5	6	7	8
	Penetapan Batas Desa/Kelurahan						
1	Pengumpulan dan Penelitian dokumen	√	√	√	√	√	√
2	Pemilihan Peta Dasar	√	√	√	√	√	√
3	Pembuatan garis batas diatas peta	√	√	√	√	√	√
Pencapaian Penetapan Batas Desa/Kelurahan		Selesai	Selesai	Selesai	Selesai	Selesai	Selesai

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penetapan batas desa/kelurahan dikecamatan Baamang telah mencapai 100% dari tahapan-tahapa penetapan batas desa/kelurahan yang harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Desa/Kelurahan yang selesai tata batas} &= \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas di Kecamatan}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan di Kecamatan}} \times 100 \% \\ &= \frac{6}{6} \times 100 \% = \underline{100 \%}\end{aligned}$$

Tahapan tersebut baru pada tahapan penetapan, sedangkan tahapan penegasan batas belum dilakukan dikarenakan terkendala hal-hal sebagai berikut :

- a. Belum adanya anggaran untuk pemasangan pilar batas antara Kelurahan/Desa.
- b. Perlu dilakukan kembali pelacakan batas antara Kelurahan Baamang Barat dan Kelurahan Baamang Hulu.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Baamang, yaitu :

- a. Mengusulkan anggaran untuk pemasangan pilar batas antara Kelurahan/Desa pada Tahun 2019.
- b. Mengusulkan penetapan dan penegasan batas ke pihak Kabupaten Kotawaringin Timur karena Kecamatan Baamang berbatasan dengan Kecamatan MB. Ketapang dan Kecamatan Kota Besi

Program pendukung capaian indikator persentase Desa/kelurahan yang telah selesai tata batas (Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan), adalah Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah(Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan), dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.268.702.618,- dan dengan realisasi sebesar Rp.3.311.307.267,- atau penyerapan anggaran sebesar 77,57 %. Walaupun penyerapan anggaran pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut belum di buat kegiataan dengan kegiatan Penyelesaian Tapal batas Desa/Kelurahan(Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan) , akan tetapi hasil maksimal yang diperoleh, karena dalam 1 (satu) kali Rapat dapat diselesaikan dengan melalui pendekatan keagamaan dan kemasyarakatan agar batas-batas administrasi antara

Desa/Kelurahan di Kecamatan Kota besi dan kecamatan Baamang secara swadaya telah dilaksanakan pada tahun 2017.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Desa/kelurahan yang telah selesai tata batas, dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Desa/kelurahan Yang Telah Selesai Tata Batas (program penyelesaian konflik-konflik pertanahan)
Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	Persentase	75	75	100%	4.268.702.618,-	3.311.307.267,-	77,57%
	Kegiatan Penyelesaian Konflik –konflik pertanahan	Jumlah Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan	Desa/ Kelurahan	5	5	75 %	5.500.000,-	825.000,-	15%

2. Pencapaian Desa/Kelurahan tertib Administrasi

Capaian kinerja indikator persentase Desa/Kelurahan tertib Administrasi adalah sebesar **100%** dari target sebesar **100%** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100%** atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun kedua Renstra, capaian tahun 2019 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 yaitu 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Desa/Kelurahan tertib Administrasi yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Baamang. Penilaian Desa/Kelurahan tertib administrasi yaitu melalui pelaksanaan evaluasi

perkembangan Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Kecamatan Baamang telah melakukan penilaian tersebut sesuai dengan Keputusan Camat Baamang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kecamatan Baamang Tahun 2019 dan Keputusan Camat Baamang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penetapan Juara Lomba Kelurahan dan Desa Tingkat Kecamatan Baamang Tahun 2019, dengan hasil penilaian sesuai tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14

**Hasil Penilaian Evaluasi Perkembangan Desa/ Kelurahan
di Kecamatan Baamang Tahun 2019**

No.	Desa/ Kelurahan	Skor/ Nilai
1	2	3
1	Kelurahan Baamang Barat	346
2	Kelurahan Baamang Hulu	357
3	Kelurahan Baamang Tengah	381
4	Kelurahan Baamang Hilir	361
5	Kelurahan Tanah Mas	338
6	Desa Tinduk	390

Berdasarkan tabel diatas diketahui dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator persentase Desa/Kelurahan tertib Administrasi adalah sebesar 100%, hal ini berdasarkan dengan telah dievaluasinya Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Baamang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Desa/ Kelurahan tertib Administrasi} &= \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{6}{6} \times 100 \% = \underline{100 \%}
 \end{aligned}$$

Semua Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Baamang telah dievaluasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, namun dari skor/nilai dari hasil penilaian tersebut, terdapat Desa/kelurahan

yang mendapatkan nilai dibawah skor/nilai yang dapat diikuti lomba Kelurahan/Desa tingkat Kabupaten, sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pembinaan lebih lanjut.

Adapun Desa/Kelurahan yang dibawah nilai/skor standar, yaitu Desa yang nilai/skor dibawah 451 dan Kelurahan yang nilai/skornya dibawah 351. Berdasarkan tabel 3.11 diatas diketahui bahwa terdapat 2 (dua) Desa/Kelurahan di Kecamatan Baamang yang nilai/skor hasil evaluasinya dibawah nilai standar tersebut, yaitu Kelurahan Tanah Mas dan Desa Tinduk.

Rendahnya nilai/skor di 2 (dua) Desa/Kelurahan tersebut dikarenakan beberapa factor, antara lain :

- a. Kelemahan SDM yang ada di Desa/Kelurahan
- b. Kurang aktifnya Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan

Dengan adanya Desa/Kelurahan yang masih dibawah nilai/skor tersebut, maka upaya-upaya yang dapat dilakukan agar Desa/Kelurahan tersebut nilainya dapat naik pada saat evaluasi Tahun 2019, antara lain :

- a. Melakukan pembinaan khusus terhadap Desa/Kelurahan tersebut sehingga nilainya pada saat evaluasi Tahun 2019 dapat meningkat
- b. Mengusulkan pengisian jabatan yang masih kosong, terutama di Kelurahan Tanah Mas
- c. Mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan dapat berperan aktif di Desa/Kelurahan untuk mendukung pembangunan dan kemasyarakatan

Program pendukung capaian indikator persentase Desa/Kelurahan tertib Administrasi, adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan evaluasi perkembangan Desa/Kelurahan, dengan tujuan dapat meningkatkan status Desa/Kelurahan dan mengetahui nilai/skor Desa/Kelurahan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.600.000,-, dan dengan realisasi sebesar Rp.10.765.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 92,80%.

b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan monitoring penggunaan dana desa, sehingga terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.280.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp.9.230.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 81,83 %.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Desa/kelurahan yang telah selesai tata batas, dapat dilihat pada tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Desa/kelurahan Yang Tertib Administrasi
Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase peningkatan perkembangan status Desa/ Kelurahan	Persentase	100	100	100%	11.600.000,-	10.765.000,-	92,80%
	Kegiatan evaluasi pengembangan Desa/ Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang dievaluasi	Desa/ Kelurahan	6	6	100%	11.600.000,-	10.765.000,-	92,80%
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase dokumen pengelolaan keuangan desa yang telah direview	Persentase	100	100	100%	11.280.000,-	9.230.000,-	81,83%
	Kegiatan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	Jumlah rancangan Perdes tentang APBDes yang dievaluasi	Desa	1	1	100%	11.280.000,-	9.230.000,-	81,83%

3. Pencapaian Lembaga perekonomian milik Desa

Capaian kinerja indikator persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa adalah sebesar **100%** dari target sebesar **100%** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100%** atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun keempat Renstra, capaian tahun 2019 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 yaitu 100% maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Lembaga perekonomian milik Desa yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Baamang.

Sehubungan hanya Desa yang dapat membentuk Lembaga Perekonomian desa atau dengan sebutan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, maka Lembaga Perekonomian milik Desa yang ada di Kecamatan Baamang hanya 1 (satu) BUMDes yaitu yang ada di Desa Tinduk yang bergerak dibidang penjualan hasil produksi masyarakat Desa Tinduk, seperti kopi, beras, dan lain-lain.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{1}{1} \times 100 \% = \underline{100 \%}$$

Untuk mengembangkan usaha BUMDes tersebut, maka apabila ada kegiatan Sampit Expo setiap tahunnya produk hasil olahan BUMDes dan UMKM di 5 (lima) kelurahan tersebut selalu diikuti sebagai promosi dan pengembangan usaha BUMDes Desa Tinduk, kelurahan Baamang Hulu, kelurahan Baamang Tengah, kelurahan Tanah Mas, kelurahan Baamang Barat dan kelurahan Baamang Hilir.

Sebagai upaya pengembangan usaha pada BUMDes dan UMKM milik desa/kelurahan tersebut, maka diberikan solusi agar dapat ditambah jenis usaha yang dikelola sehingga dapat

cepat berkembang dengan melihat kondisi kebutuhan masyarakat di Desa, seperti penyediaan air galon isi ulang.

Program pendukung capaian indikator persentase Lembaga perekonomian milik Desa, adalah Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah dengan kegiatan Pelaksanaan Sampit Expo, dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.750.000,-, dan dengan realisasi sebesar Rp.18.750.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 100%.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Lembaga perekonomian milik Desa, dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Lembaga Perekonomian Milik Desa
Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	Prosentase Peningkatan produk unggulan Kecamatan yang dipromosikan	Persentase	100	100	100%	18.750.000,-	18.750.000,-	100%
	Kegiatan pelaksanaan Sampit Expo	Jumlah kegiatan expo yang diikuti	Kegiatan	1	1	100%	18.750.000,-	18.750.000,-	100%

4. Pencapaian Jumlah PKK Desa/Kelurahan Aktif

Capaian kinerja indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun keempat Renstra, capaian tahun 2019 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 yaitu 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif yang diperoleh dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Baamang. Adapun hasil penilaian PKK Desa/Kelurahan yang aktif/ tidak aktif, sebagaimana table 3.17, berikut :

Tabel 3.17
Data PKK Desa/ Kelurahan di Kecamatan Baamang Tahun 2019

No.	Kriteria Aktif	PKK Kelurahan/ Desa					
		Baamang Hilir	Baamang Tengah	Baamang Hulu	Baamang Barat	Tanah Mas	Tinduk
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Memiliki Surat Keputusan (SK) kepengurusan PKK Kelurahan/Desa	√	√	√	√	√	√
2	Kepengurusan/ keanggotaan lengkap sesuai ketentuan	√	√	√	√	√	√
3	Memiliki ruang PKK di Kelurahan/ Desa	√	√	√	√	√	√
4	Kegiatan PKK Berjalan (Pokja)	√	√	√	√	√	√
5	Mempunyai rencana/ agenda/ program kerja tahunan	√	√	√	√	√	√
Aktif/ Tidak Aktif		Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif

Berdasarkan tabel 3.17 tersebut diatas, maka dapat disimpulkan PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Baamang berjumlah 6 (enam) PKK Desa/Kelurahan, dari 5 (lima) indikator yang ditetapkan untuk mengetahui aktif/tidaknya PKK Desa/Kelurahan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) PKK Desa/Kelurahan yang aktif atau semua PKK Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Baamang aktif semua (100%)

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua PKK Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan Baamang dapat dikategorikan aktif. Walaupun masih terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan, seperti perlu adanya peningkatan pengetahuan/pemahaman pengurus dan anggota PKK Desa/Kelurahan terhadap 10 (sepuluh) pokok program PKK dan berkaitan dengan kelengkapan kebun TOGA PKK.

Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menginsentifkan pembinaan PKK Kecamatan terhadap PKK Desa/ Kelurahan, serta melakukan kegiatan sosialisasi program pokok PKK atau

pengembangan kreativitas anggota PKK Desa/ Kelurahan dengan mengundang PKK Kabupaten atau nara sumber lain.

Program pendukung capaian indikator persentase PKK Desa/Kelurahan Aktif adalah Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan/Kelurahan/Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp.38.000.000,-, dan dengan realisasi sebesar Rp.20.436.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 53,78%. Walaupun realisasi penyerapan anggaran sangat rendah, akan tetapi tujuan pembinaan PKK Desa/Kelurahan tercapai, sehingga didapatkan hasil semua PKK Desa/Kelurahan di Kecamatan Baamang aktif.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator PKK Desa/Kelurahan Aktif, dapat dilihat pada tabel 3.18 berikut :

Tabel 3.18
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
PKK Desa/Kelurahan Aktif
Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Prosentase Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan di Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Persentase	100	100	100%	38.000.000,-	20.436.000,-	53,78%
	Kegiatan pembinaan PKK Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Jumlah anggota/ kelompok yang dibina	Kelompok	6	6	100%	38.000.000,-	20.436.000,-	53,78%

3

Sasaran : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan**” diukur melalui 2 (Dua) indikator.

Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran 3
“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan” Tahun 2019
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Prosentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	100	100	100,00	100	100,00
2	Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Orang	300	306	10,6	45	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					94,44		94,44

Sasaran Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan diukur melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Prosentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani, dan Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “**Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan**” adalah sebesar **94,44%** yang berarti masuk dalam katagori capaian “**Baik**” akan tetapi “**Tidak Mencapai Target**”

Perbandingan **realisasi kinerja** tahun 2018 dan tahun 2019 disajikan pada tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3
2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Prosentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani	Persentase	100	100
2	Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/ Desa	Orang	45	45

1. Pencapaian Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantibmas) yang ditangani.

Capaian kinerja indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani adalah sebesar **100%** dari target sebesar **100%** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100%** atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun keempat Renstra, capaian tahun 2019 adalah 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 adalah 100%, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani yang diperoleh dari Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Baamang.

Data diperoleh dari laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan atau sengketa tanah/lahan yang perlu ditindaklanjuti, dengan penilaian sesuai tabel 3.21 berikut :

Tabel 3.21
Data Jumlah Pelanggaran/ Laporan Kejadian
yang ditindaklanjuti oleh Kecamatan Baamang
Tahun 2019

No.	Jenis Pelanggaran/ Laporan Kejadian	Pelanggaran/ Laporan	Tindaklanjuti	Capaian	Kepala Seksi yang menangani
1	2	3	4	5	6
1	Sengketa Tanah/Lahan	5	5	100%	Tata Pemerintahan
2	Kebakaran	2	2	100%	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Pencurian	0	0	0	
4	Perkelahian	0	0	0	
5	Kenakalan Remaja	0	0	0	
Jumlah		7	7	100%	

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jenis pelanggaran/ laporan kejadian yang paling banyak masuk yaitu berkaitan dengan permohonan untuk penyelesaian sengketa tanah/ lahan, dan telah ditindaklanjuti oleh Kecamatan Baamang melalui Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang diselesaikan melalui Kelurahan.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Prosentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani} &= \frac{\text{Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban yang dilaporkan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{7}{7} \times 100 \% = \underline{100 \%}
 \end{aligned}$$

Data tersebut diambil berdasarkan laporan masyarakat yang masuk ke Kecamatan Baamang, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Seksi atau Lurah yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk penyelesaian laporan pelanggaran kemananan dan ketertiban tersebut.

Program pendukung capaian indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani adalah sebagai berikut :

a. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan, sehingga tidak terjadi sengketa lahan/tanah dimasyarakat.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.500.000,-, dan dengan realisasi sebesar Rp. 825.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 15%, tidak terserapnya anggaran untuk kegiatan tersebut karena kadang kala penyelesaian sengketa tanah diselesaikan di Kelurahan atau langsung di lapangan, sehingga biaya secara swadaya pihak-pihak yang melaporkan/ bersengketa.

b. Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan rapat koordisasi dan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan/lahan sehingga dapat meminimalisir kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Baamang.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.17.242.500,-, dan dengan realisasi sebesar Rp.6.242.500,- atau penyerapan anggaran sebesar 36,20%.

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Output dari program beserta kegiatan-kegiatan didalamnya adalah terlaksananya kegiatan pembinaan pengurus RT/RW se-Kecamatan Baamang, dengan tujuan agar Ketua RT/RW dapat berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk menjaga kemandirian dan ketertiban lingkungan masing-masing

Dengan pagu anggaran sebesar Rp.31.608.000,-, dan dengan realisasi sebesar Rp.29.708.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 93,99%.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator persentase Pelanggaran Trantibmas yang ditangani, dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Pelanggaran Trantibmas Yang Ditangani
Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Prosentase penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Persentase	75	50	67%	5.500.000,-	825.000,-	15%
	Kegiatan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik-konflik pertanahan yang difasilitasi	Kasus	10	5	50%	5.500.000,-	825.000,-	15%
2	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah kasus kebakaran lahan dan hutan yang dapat ditangani	Persentase	75	75	100%	17.242.500,-	6.242.500,-	36,20%
	Kegiatan sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	200	150	75%	11.742.500,-	6.242.500,-	36,20%
	Kegiatan Pengendalian kebakaran Hutan	Jumlah Penangan kebakaran Hutan	Unit	1	5	70%	5.500.000,-	0,-	0%
	Kegiatan koordinasi pengendalian kebakaran hutan	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan							
3	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Prosentase keterlibatan masyarakat melalui RT/RW dalam menjaga Kamtibmas	Persentase	75	75	100%	31.608.000,-	29.708.000,-	93,99%
	Kegiatan pembinaan pengurus RT/RW se-Kecamatan Baamang	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	160	170	106%	31.608.000,-	29.708.000,-	93,99%

2. Pencapaian petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa.

Capaian kinerja indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa adalah 40 orang dari target sebanyak 45 orang yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau tercapai dari target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun keempat Renstra, capaian tahun 2019 adalah sejumlah 40 orang petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 adalah 45 orang, maka capaian kinerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diperoleh dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Baamang, sesuai tabel 3.23 berikut :

Tabel 3.23
Petugas Linmas di Kecamatan Baamang
Tahun 2019

No.	Kecamatan/Desa/ Kelurahan	Jumlah Petugas Linmas
1	2	3
1	Kecamatan Baamang	10 Orang
2	Kelurahan Baamang Hilir	7 Orang
3	Kelurahan Baamang Tengah	12 Orang
4	Kelurahan Baamang Hulu	8 Orang
5	Kelurahan Baamang Barat	8 Orang
6	Kelurahan Tanah Mas	5 Orang
7	Desa Tinduk	5 Orang
J u m l a h		45 Orang

Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa petugas Linmas Kecamatan/Desa/Kelurahan di Kecamatan Baamang berjumlah 45 orang dari target 45 orang. Diamana data petugas Linmas tersebut hanya berasal dari petugas Linmas yang terdaftar di Kecamatan Baamang.

Faktor yang menghambat pencapaian indikator tersebut karena biasanya petugas Linmas hanya aktif pada saat akan diadakan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terutama untuk petugas Linmas TPS.

Sehingga upaya/solusi dimasa yang akan datang, yaitu :

1. Melakukan kegiatan pembinaan ke RT/RW agar dapat mengaktifkan petugas Linmas RT/RW, terutama untuk menjaga Poskamling RT/RW
2. Melakukan pendataan ulang petugas Linmas pada Tahun 2019 sebagai persiapan Pemilihan Umum Tahun 2020
3. Mengadakan pakaian untuk petugas Linmas secara swadaya atau melalui anggaran Kecamatan Baamang, agar petugas Linmas menjadi semangat sebagai petugas Linmas

Program pendukung capaian indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.141.574.000,- dan dengan realisasi sebesar Rp.100.851.700,- atau penyerapan anggaran sebesar 71,24%.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator jumlah petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa, dapat dilihat pada tabel 3.24 berikut :

Tabel 3.24
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Jumlah Petugas Linmas di Kecamatan/Kelurahan/Desa
Tahun 2018

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peningkatan kamtibmas	Persentase	75	70	93%	141.574.000,-	100.851.700,-	71,24%
	Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pelanggaran kamtibmas yang ditangani	Kasus	10	7	70%	141.574.000,-	100.851.700,-	71,24%

4

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**” diukur melalui 2 (Dua) indikator.

Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran 4
“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan” Tahun 2019
Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian (%)	Tahun 2021	Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	
1	2	3	4`	5	6	7	8
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	62	62,69	108,51	65,00	94,09
2	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					108,51		94,09

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan diukur melalui 2 (dua) indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai AKIP Kecamatan, dan Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**” adalah sebesar **108,51%** yang berarti masuk dalam katagori capaian “**Sangat Berhasil**” atau “**Melebihi Target**”

Perbandingan realisasi kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tahun 2017 dan Tahun 2018 disajikan pada tabel 3.26 berikut :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4
2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	2	3	4	5
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	61,97	62,69
2	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100

1. Analisis pencapaian nilai AKIP Kecamatan Baamang

Capaian kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Baamang adalah sebesar 61,97 dari target sebesar 63,35 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **107,09 %** atau melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Baamang Tahun 2018 yaitu 61,89 maka terjadi peningkatan 62,69 dari Tahun 2019.

Tahun 2019 merupakan tahun keempat Renstra, capaian tahun 2019 sebesar 62,69 bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 yaitu senilai 65 maka capaian kinerjanya mencapai 94,09%.

Data penunjang capaian kinerja indikator nilai AKIP Kecamatan Baamang yang diperoleh dari Sekretariat Kecamatan Baamang pada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan, yang berasal dari hasil review Inspektorat atas LKIP Kecamatan Baamang Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel 3.27 berikut :

Tabel 3.27
Data Nilai AKIP Kecamatan Baamang Tahun 2019

No.	Komponen Pengukuran AKIP	Nilai
1	2	3
1	Perencanaan Kinerja	63,35
	a. Perencanaan Strategis	51,06
	- Pemenuhan Renstra	88,89
	- Kualitas Renstra	50,00
	- Implementasi Renstra	66,67
	b. Perencanaan Kinerja Tahunan	56,38
	- Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	100,00
	- Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	62,50

	- Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	50,00
No.	Komponen Pengukuran AKIP	Nilai
1	2	3
2	Pengukuran Kinerja	70,11
	a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja	75,00
	b. Kualitas Pengukuran Kinerja	55,77
	c. Implementasi Pengukuran Kinerja	43,75
3	Pelaporan Kinerja	68,57
	a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100,00
	b. Penyajian Informasi Kinerja	75,00
	c. Pemanfaatan Informasi Kinerja	43,75
Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Baamang		61,97

Sedangkan perbandingan antara nilai AKIP Kecamatan Baamang Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.28, berikut :

Tabel 3.28
Perbandingan Nilai AKIP Kecamatan Baamang
Tahun 2018 dan Tahun 2019

No.	Komponen Pengukuran AKIP	Tahun 2019	Tahun 2018
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	64,67	63,35
	a. Perencanaan Strategis	51,28	51,06
	- Pemenuhan Renstra	86,11	88,89
	- Kualitas Renstra	53,57	50,00
	- Implementasi Renstra	62,50	66,67
	b. Perencanaan Kinerja Tahunan	58,03	56,38
	- Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	95,85	100,00
	- Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	62,50	62,50
	- Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan	58,36	50,00
2	Pengukuran Kinerja	71,22	70,11
	a. Pemenuhan Pengukuran Kinerja	75,00	75,00
	b. Kualitas Pengukuran Kinerja	57,69	55,77
	c. Implementasi Pengukuran Kinerja	43,75	43,75
3	Pelaporan Kinerja	67,78	68,57
	a. Pemenuhan Pelaporan Kinerja	80,00	100,00
	b. Penyampaian Informasi Pelaporan Kinerja	75,00	75,00
	c. Pemanfaatan Informasi Pelaporan Kinerja	56,25	43,75
Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Baamang		62,69	61,97

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil kesimpulan Penilaian AKIP Kecamatan Baamang Tahun 2019 adalah 62,69 dari 3 komponen pengukuran AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat

Kabupaten Kotawaringin Timur. Dari hasil evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh Kecamatan Baamang agar nilai Evaluasi SAKIP pada Tahun Anggaran 2019 dapat meningkat, antara lain :

- a. Dokumen Renstra agar membuat indikator kinerja tujuan, dimana indikator kinerja tujuan (*outcome*) yang memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik
- b. Target kinerja agar ditetapkan dengan baik
- c. Dokumen Renstra dan IKU agar direviu secara berkala
- d. Mekanisme pengumpulan data kinerja harus sesuai agar dapat diyakini validasinya

Sehubungan dengan saran Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan Kecamatan Baamang antara lain :

- a. Berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Timur dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait reviu Renstra dan IKU Kecamatan Baamang
- b. Dilakukan perbaikan SOP Kecamatan Baamang terutama yang berkaitan dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan SOP Pembuatan LKIP Kecamatan Baamang

Keberhasilan pencapaian indikator nilai AKIP disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

- Faktor pendukung, antara lain :
 - 1) Adanya dukungan dari pimpinan untuk meningkatkan nilai AKIP
 - 2) Adanya kesiapan SDM untuk mengembangkan pengetahuan tentang AKIP
 - 3) Tersedianya sarana dan prasarana untuk mengembangkan pengetahuan
- Faktor penghambat, antara lain :
 - 1) Adanya perubahan pada struktur organisasi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016, yang mengakibatkan kepala sub bagian dibawah Sekretariat Kecamatan yang tadinya 3 (tiga) sub bagian menjadi hanya 2 (dua) sub bagian sehingga terjadi penambahan beban kerja.
 - 2) Penempatan posisi pengisian jabatan yang tidak sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kecamatan Baamang.

Untuk meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Kecamatan Baamang, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

- a. Mengikut sertakan aparatur kecamatan dalam pembinaan dan pengembangan pembuatan perencanaan hingga pelaporan (LKIP).
- b. Melakukan reuiu terhadap dokumen Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021 dan IKU Kecamatan Baamang.

Program pendukung capaian indikator Nilai AKIP Kecamatan adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD, serta kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan pagu anggaran sebesar Rp.22.900.000,-, dan dengan realisasi sebesar Rp.16.322.680,- atau penyerapan anggaran sebesar 71,28%.

Untuk lebih terperinci mengenai program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Nilai AKIP Kecamatan, dapat dilihat pada tabel 3.29 berikut :

Tabel 3.29
Program/ Kegiatan Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja
Nilai AKIP Kecamatan Baamang
Tahun 2019

No.	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah laporan yang sesuai standard	Laporan	3	3	100%	22.900.000,-	16.322.680,-	71,28%
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun	Laporan	2	2	100%	18.970.000,-	12.675.862,-	62,82%
	Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Laporan	1	1	100%	3.930.000,-	3.646.818,-	92,79%

2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Capaian kinerja indikator persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kerjanya 100% mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun keempat renstra, capaian tahun 2019 sebesar 100% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2021 yaitu 100%, maka capaian kerjanya mencapai 100%.

Data penunjang capaian kinerja indikator persentase temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti yang diperoleh dari Sekretariat Kecamatan Baamang pada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.

Tabel 3.30
Data Jenis Temuan BPK/Inspektorat yang sudah ditindaklanjuti
Kecamatan Baamang Tahun 2019

No	Unsur Pemeriksaan	Temuan	Rekomendasi	Ditindaklanjuti	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Kebijakan Daerah	-	-	-	-
2	Kelembagaan	-	-	-	-
3	Pengelolaan Pegawai Daerah	-	-	-	-
4	Pengelolaan Keuangan Daerah	3	3	3	100
5	Pengelolaan Barang Daerah	2	2	2	100
	Jumlah	5	5	5	100

Berdasarkan table tersebut diatas, dapat diketahui temuan Inspektorat yaitu sebanyak 5 temuan yang terdiri dari 3 temuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan 2 temuan tentang pengelolaan barang daerah. Dari 3 temuan tersebut telah ditindaklanjuti berupa perbaikan data pada KIB, kelengkapan bukti kwitansi yang kurang, serta pengembalian atas kekurangan pekerjaan jasa konstruksi ke Kas Daerah sesuai rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tabel 3.31
Perbandingan Data Temuan BPK/Inspektorat di Kecamatan Baamang
Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Unsur Pemeriksaan	Temuan		Rekomendasi		Ditindaklanjuti	
		2019	2018	2019	2018	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kebijakan Daerah						
2	Kelembagaan						
3	Pengelolaan Pegawai Daerah						
4	Pengelolaan Keuangan Daerah	2	3	3	3	3	3
5	Pengelolaan Barang Daerah	3	4	2	4	2	4
	Jumlah	4	7	4	7	4	7

Dari table diatas sebagai perbandingan temuan BPK/ Inspektorat di Kecamatan Baamang pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, dimana berdasarkan table tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penurunan temuan Inspektorat atas Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang dari 7 temuan pada Tahun 2018 menjadi 5 temuan pada Tahun 2019.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti disebabkan faktor pendukung dan penghambat, sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- a. Kesiapan SDM untuk menindaklanjuti temuan
- b. Adanya reward dan dukungan dari pimpinan

Faktor penghambat :

- a. Minimnya pengetahuan SDM atas peraturan terbaru tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah
- b. Kurangnya jumlah SDM dalam pembagian job description, terutama pada sub bagian Keuangan dan Sub bagian Umum dan Pelaporan.

Untuk mempertahankan capaian prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan, sebagai berikut :

- a. Mengajukan penambahan SDM kepada BKD Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Kecamatan Baamang
- b. Memberangkatkan Pegawai untuk mengikuti Diklat/Bimbingan Teknis untuk meningkatkan pengetahuan sesuai dengan peraturan terbaru
- c. Agar dilakukan pembinaan secara internal secara berkala

C. REALIASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Kantor Kecamatan Baamang di tahun 2018 menggabungkan jumlah **Belanja Tidak Langsung** Rp. 4.755.305.100,- dan **Belanja Langsung** sebesar Rp. 8.398.969.525,-. Data anggaran di DPPA Kantor Kecamatan Baamang untuk tahun anggaran 2019 adalah tersaji sebagai berikut :

Tabel 3.32
Alokasi dan Realisasi Anggaran Kecamatan Baamang Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN			
	1. PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	1) Pajak Daerah			
	2) Retribusi Daerah	-	-	-
	3) Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
	4) Lain-Lain PAD yang sah	-	-	-
II.	BELANJA	13.154.274.625,-	11.647.200.617,-	88,54
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.755.305.100,-	4.390.536.033,-	92,33
	1) Belanja Pegawai	4.755.305.100,-	4.390.536.033,-	92.33
III.	BELANJA LANGSUNG	8.398.969.525,-	7.256.664.584,-	86,40
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	846.257.144,-	794.546.882,-	93,89
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,-,-	7.500.000,-	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	69.939.864,-	59.783.611,-	85,48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.610.000,-	1.260.300,-	34,91

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	254.928.380,-	248.652.806,-	97,54
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13.316.000,-	13.316.000,-	100,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.488.400,-	40.488.400,-	100,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.915.700,-	13.928.033,-	93,38
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.478.800,-	7.478.800,-	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000,-	5.760.000,-	100,00
	Penyediaan Makanan Dan Minuman	74.250.000,-	46.302.000,-	62,36
	Rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah	290.390.000,-	286.501.932,-	98,66
	Rapat Koordinasi & Konsultasi Kedalam Daerah	63.680.000,-	63.575.000,-	99,84
2	Program Peningkatan Saran Dan Prasarana Aparatur	2.449.977.643,-	2.415.287.545,-	98,58
	Pembangunan Gedung Kantor	1.554.950.000,-	1.545.613.000,-	99,40
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	0,-	0,-	0
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	88.805.730,-	87.889.000,-	98,97
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	181.961.427,-	179.890.000,-	98,31
	Pengadaan Mebeuler	51.595.700,-	50.240.000,-	97,37
	Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas	0,-	0,-	0
	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	16.250.000,-	12.883.500,-	79,28
	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Oprasional	64.469.390,-	58.420.795,-	90,62
	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	9.380.000,-	2.300.000,-	24,52
	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	10.650.000,-	10.645.000,-	99,95
	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	471.915.396,-	468.406.250,-	99,26
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	33.500.000,-	31.185.000,-	93,09
	Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapanya	33.500.000,-	31.185.000,-	93,09
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	0,-	0,-	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	150.000.000,-	146.000.000,-	97,33
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	150.000.000,-	146.000.000,-	97,33
	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,-	146.000.000,-	97,33

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.900.000,-	16.322.680,-	71,28
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	18.970.000,-	12.675.862,-	66,82
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3.930.000,-	3.646.818,-	92,79
6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	17.500.000,-	17.500.000,-	100,00
	Pasilitasi Festival Habaring Hurung	17.500.000,-	17.500.000,-	100,00
7	Program Peningkatan Promosi dan Investasi Daerah	18.750.000,-	18.750.000,-	100,00
	Pelaksanaan Sampit Expo	18.750.000,-	18.750.000,-	100,00
8	Program Penataan Administrasi Kependudukan	117.938.920,-	115.955.204,-	98,32
	Pembentukan dan Penataan Sistem koneksi (interPhase tahap awal)NIK	117.938.920,-	115.955.204,-	98,32
9	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	141.574.000,-	100.851.700,-	71,24
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	141.574.000,-	100.851.700,-	71,24
10	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	4.268.702.618,-	3.311.307.267,-	77,57
	Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	213.675.000,-	208.520.000,-	97,59
	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Kemasyarakatan	213.675.000,-	208.520.000,-	97,59
	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Baamang Hilir	300.536.330,-	271.834.542,-	90,45
	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Baamang Tengah	442.790.330,-	412.854.981,-	93,24
	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Baamang Hulu	320.398.568,-	249.616.527,-	77,91
	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Tanah Mas	210.131.330,-	192.246.514,-	91,49
	Penyediaan Barang dan Jasa Kelurahan Baamang Barat	318.381.060,-	269.689.131,-	84,71

No	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
11	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	5.500.000,-	825.000,-	15,00
	Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan	5.500.000,-	825.000,-	15,00
12	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	11.600.000,-	10.765.000,-	92,80
	Evaluasi Pengembangan Desa dan Kelurahan	11.600.000,-	10.765.000,-	92,80
13	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	31.608.000,-	29.708.000,-	93,99
	Pembinaan Pengurus RT/RW se-Kecamatan Baamang	31.608.000,-	29.708.000,-	93,99
14	Program Penunjang Kegiatan PKK	38.000.000,-	20.436.000,-	53,78
	Pembinaan Tim Penggerak PKK	38.000.000,-	20.436.000,-	53,78
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	16.088.700,-	12.363.306,-	76,84
	Penyelenggaraan Musrenbnag RKPD	16.088.700,-	12.363.306,-	76,84
16	Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	17.242.500,-	6.242.500,-	36,20
	Pengendalian kebakaran Hutan	5.500.000,-	0,-	0
	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	0	0	0
	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	11.742.500,-	6.242.500,-	53,16
17	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	11.280.000,-	9.230.000,-	81,83
	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes	11.280.000,-	9.230.000,-	81,83
18	Program Pengadaan Tanah	200.550.000,-	199.388.500,-	99,42
	Pelaksanaan Pengadaan Tanah	200.550.000,-	199.388.500,-	99,42
	Capaian Kinerja Keuangan			88,54

Dari data diatas menunjukan bahwa secara keseluruhan Kantor Kecamatan Baamang telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar **13.154.274.625,-** degan realisasi

penyerapan anggaran sebesar Rp. **11.647.200.617,-** capaian kinerja keuangan sebesar 88,54 % terdiri dari 18 (Delapan Belas) Program dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Kegiatan.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran sesuai Renstra Kecamatan Baamang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.33
Sasaran, Indikator Sasaran dan Realisasi Keuangan
Kecamatan Baamang Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja				Keuangan		
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Baik	Baik	100%	846.257.144,-	794.546.882,-	93,89%
		Prosentase Usulan yang tertampung dalam Musrenbang RKPD di Kecamatan	%	100	100	100%	16.088.700,-	12.363.306,-	76,84%
2	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Prosentase desa/ kelurahan Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	%	83	100	120,48%	213.675.000,-	208.520.000,-	97,59%
		Prosentase Desa/ Kelurahan yang tertib administrasi	%	100	100	100%	11.600.000,-	10.765.000,-	92,80%
		Prosentase Lembaga perekonomian milik Desa	%	100	100	100%	18.750.000,-	18.750.000,-	100%
		Jumlah PKK Desa/ Kelurahan aktif	Kelompok	6	6	100%	38.000.000,-	20.436.000,-	53,78%
3	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	Prosentase pelanggaran Trantibmas yang ditangani	%	100	100	100%	31.608.000,-	29.708.000,-	93,99 %
		Jumlah petugas Linmas di Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Orang	45	40	88,89%	141.574.000,-	100.851.700,-	71,24 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	57	62,69	112,80	22.900.000,-	16.322.680,-	71,28%
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindak lanjuti	%	100	100	100%			
Nilai Rata-rata Pencapaian / Jumlah Anggaran						112,80	1.340.452.844	1.212.263.568	84,82%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Baamang dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Baamang, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 112,80% dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar 84,82%, dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,18% atau terdapat silpa sebesar Rp.128.189.276,-

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang telah dikemukakan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Baamang disusun sebagai *wujud dukungan* terhadap sistem administrasi yang diharapkan mampu menjamin kelancaran dan keserasian tugas aparatur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali, *alat penilai kualitas kerja dan alat stimulasi* dalam mewujudkan *good governance* dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat/publik.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) berfungsi sebagai parameter atau ukuran yang dapat menunjukkan,menentukan, memberi suatu ide atau memberikan dasar untuk mengambil kesimpulan atas sesuatu.
3. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
4. Dari 4 (empat) sasaran yang telah ditetapkan terdapat 10 (Sepuluh) indikator kinerja sasaran, pada Tahun 2019 rata-rata mencapai **112, 80%** atau bernilai **Baik Sekali**, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik mencapai 100%, melalui 2 indikator yaitu pencapaian rata-rata indeks kepuasan masyarakat mencapai 100% dari target nilai Baik, dan pencapaian prosentase usulan yang tertampung dalam hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan mencapai 100% dari target 100%;

- b. Meningkatnya kualitas pemerintahan Desa/Kelurahan mencapai 105,12%, melalui 4 indikator yaitu pencapaian prosentase Desa/Kelurahan yang telah selesai tata batas mencapai 120,48% dengan realisasi 100% dari target 83%, pencapaian prosentase Desa/Kelurahan yang tertib administrasi mencapai 100% dari target 100%, pencapaian prosentase Lembaga perekonomian milik Desa mencapai 100% dari target 100%, dan Jumlah PKK Desa/Kelurahan aktif mencapai 100% dari target 6 Kelompok PKK;
 - c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban lingkungan mencapai 94,44%, melalui 2 indikator yaitu pencapaian persentase pelanggaran Tarntibmas yang ditangani mencapai 100% dari target 100%, dan pencapaian jumlah petugas Linmas Kecamatan/Kelurahan/Desa mencapai 88,89% dari target 45 orang terealisasi 40 orang;
 - d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan mencapai 103,72%, melalui 2 indikator yaitu pencapaian Nilai AKIP Kecamatan mencapai 107,44% dari target nilai 57 terealisasi nilai 61,97, dan pencapain persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti mencapai 100% dari target 100%
5. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 4 (empat) sasaran yang mencakup 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran, diketahui bahwa 2 (dua) indikator sasaran atau 20% Baik Sekali, 7 (tujuh) indikator sasaran atau 70% Baik, 1 (satu) indikator sasaran atau 10% Cukup.
 6. Anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran Kecamatan Baamang, dimana nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran 101,68% dengan realisasi penggunaan anggaran untuk mencapai target tersebut sebesar 93,02%, dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,03% atau terdapat silpa sebesar Rp.323.958.141,-, dari Pagu Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp. 4.305.646.430,- terealisasi sebesar Rp. 3.981.688.289,-

B. SARAN

Dalam pengumpulan dan penyusunan Data Laporan Kinerja Pemerintah Daerah secara maksimal karena masing-masing bagian kurangnya sumber daya aparatur pendidikan formil maupaun diklat, kurangnya motivasi pegawai dalam segala bentuk kegiatan

Guna mewujudkan indikator kinerja sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan atau belum maksimal realisasinya, pada waktu yang akan datang akan ditempuh berbagai langkah sebagai berikut :

1. Mempertajam penyusunan rencana biaya/anggaran melalui RKA / RKT dan DPA dengan melibatkan semua aparatur yang terkait.
2. Melakukan evaluasi per triwulan atau per semester atau setiap akhir tahun anggaran dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal secara intensif dengan pihak Kelurahan dan masyarakat se Kecamatan Baamang.
4. Membuat dokumentasi, pencatatan dan pengarsipan khusus atas semua data yang diperlukan dalam penyusunan LKIP.
5. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur/staf dengan mengikutsertakan dalam Diklat LKIP atau Diklat, bimbingan teknis lainnya yang diperlukan.
6. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana kerja guna menunjang kelancaran aktifitas pelayanan kepada publik.

Penyusunan LKIP Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur ini masih belum sempurna, karena itu perlu saran, koreksi/masukan yang positif pada masa yang akan datang.

**Penyusun,
Sekretaris Kecamatan Baamang,**

SUFIANSYAH, SE

